



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHARIS MARDIYANTO
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 10580

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 14.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 399 m2/440 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 4195 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, WARISAN Rp. 4.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2145 m2/250 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 438 m2/100 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 527 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 505.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA/MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 89.533.500

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 64.472.437

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 14.659.005.937



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 14.659.005.937

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.